



GERMAS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR
2022**



Jl. R.M. Tirto Adhi Soerjo No.3
Kota Bogor

Kode Pos 16161
Telp/Fax. (0251) 8331753
e-mail : dinkes@kotabogor.go.id



www.dinkes.kotabogor.go.id



@dinkeskotabogor



Dinas Kesehatan Kota Bogor



@BogorDinkes



Kata Pengantar

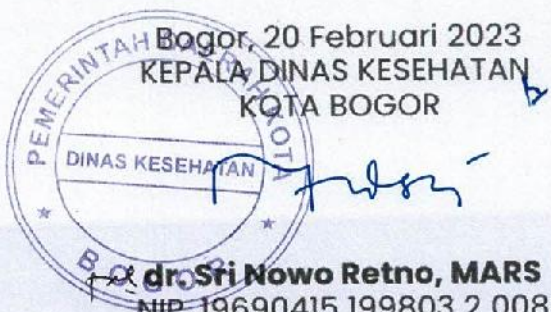
KEPALA DINAS KESEHATAN

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Sang Mahakuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 merupakan laporan yang disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor dapat dikategorikan sangat baik. Namun demikian, masih terdapat indikator sasaran yang belum mencapai target yang telah diharapkan. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja di Dinas Kesehatan serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang dalam mewujudkan Clean Government dan Good Government yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Demikian laporan ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Bogor, 20 Februari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR



dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP. 19690415 199803 2 008

DAFTAR ISI

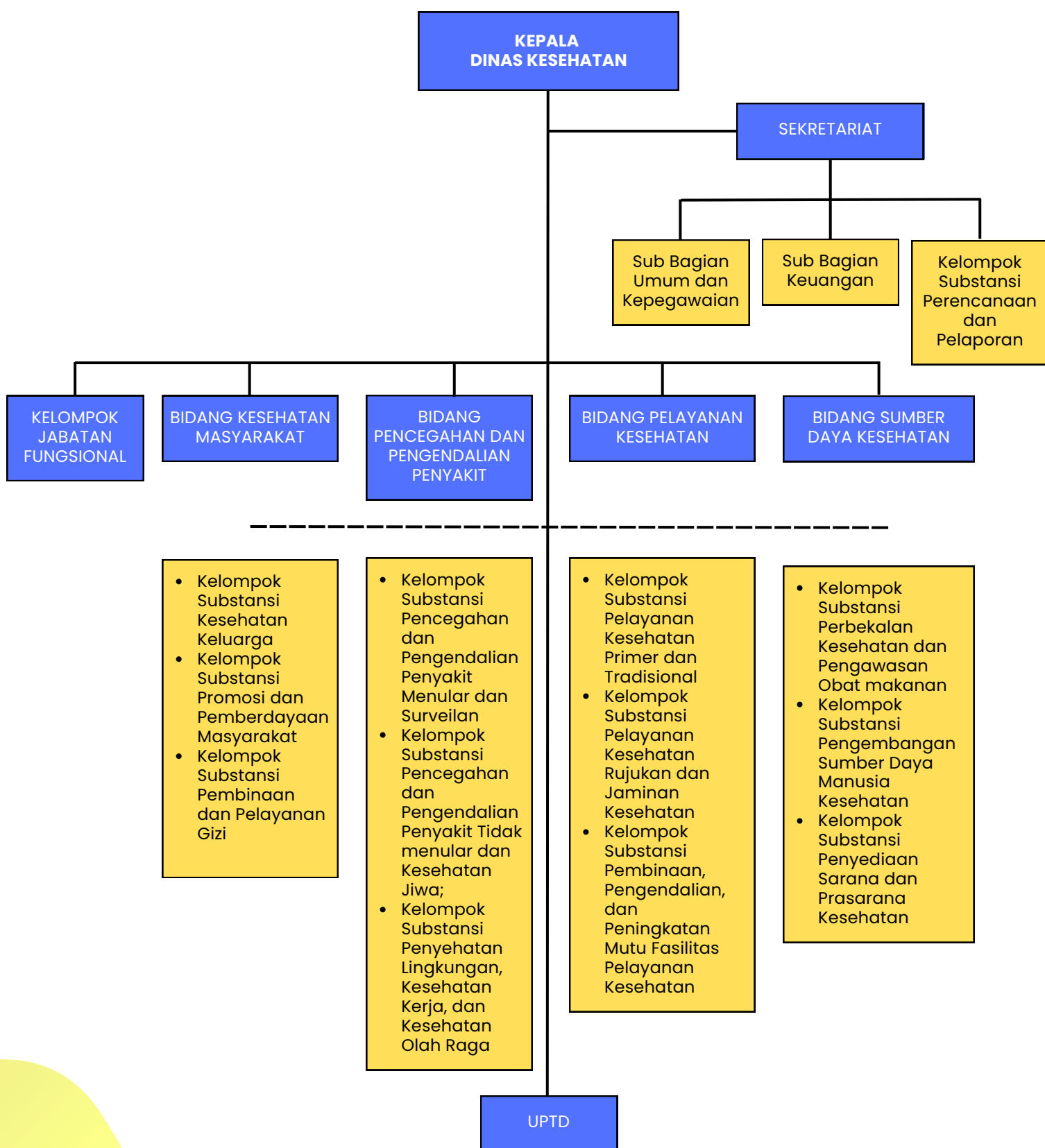
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	3
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
B. REALISASI ANGGARAN	37
BAB 4 PENUTUP	39

BAB 1

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 159 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor, **Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :**



1 dari 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020–2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Guna mewujudkan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui **peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.**

Terdapat 5 (lima) poin yang menjadi fokus RPJMN guna meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui :

- 1.Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi.
- 2.Percepatan perbaikan gizi masyarakat.
- 3.Peningkatan pengendalian penyakit.
- 4.Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- 5.Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Lima poin sebagaimana diatas juga menjadi isu strategis dari Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam melaksanakan upaya pembangunan kesehatan di Kota Bogor. **Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus Dinas Kesehatan yaitu :**

- 1.Implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
- 2.Mewujudkan Generasi yang Sehat Menghadapi Bonus Demografi
- 3.SUN-Scalling Up Nutrition (Gerakan 1000 HPK)
- 4.Adanya Beban Ganda Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Tripple Barden) terutama TB, HIV/AIDS, DM, Hipertensi, Gangguan Jiwa
- 5.Komitmen Global berupa Sustainable Development Goals (SDGs) terutama Target nasional berupa Komitmen eliminasi penyakit menular khususnya Indonesia eliminasi TB Paru Tahun 2030
- 6.Peningkatan Akses Sanitasi Layak
- 7.Pencegahan dan penanggulangan Covid-19
- 8.Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- 9.Penyelenggaraan akses layanan melalui Kunjungan dokter keluarga
- 10.Penyelenggaraan layanan kesehatan Konseling dan Call Center 24 Jam pada fasilitas kesehatan
- 11.Pembangunan Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS PK)
- 12.Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta
- 13.Kebijakan pemerintah Kab/kota untuk Jaminan Kesehatan Nasional (Universal Health Coverage)
- 14.Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar
- 15.Smart Health System (Pendekatan Pelayanan Dengan Sistem Teknologi Informasi) yang terintegrasi
- 16.Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

VISI KOTA BOGOR

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan mendukung Visi Kota Bogor. Adapun Visi Kota Bogor sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2019-2024 yaitu :

"Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga"

MISI KOTA BOGOR

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, Wali Kota Bogor memiliki misi sebagai berikut :

Mewujudkan
Kota Bogor Yang
Sehat

1

Mewujudkan
Kota Bogor Yang
Cerdas

2

Mewujudkan
Kota Bogor Yang
Sejahtera

3

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan mendukung Misi Kota Bogor yang ke 1 dan 2.

Cascading kinerja dalam rangka mendukung Misi 1 Kota bogor sebagai berikut :

RPJMD

Misi 1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat	
Tujuan 1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Sehat dan Lingkungan yang Berkualitas	
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Indikator : Angka Harapan Hidup (AHH)	Indikator : Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS



Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Tujuan 2. Terwujudnya pola hidup sehat di masyarakat
Indikator : Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Indikator : Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS
Sasaran 1. Terwujudnya Keluarga Sehat	Sasaran 2. Meningkatnya Rumah tangga sehat
Indikator : Indeks Keluarga Sehat	Indikator : Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS

RENSTRA DINAS KESEHATAN

Cascading kinerja dalam rangka mendukung Misi 2 Kota bogor sebagai berikut :

RPJMD

Misi 2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan Melayani

Sasaran 1.2.1 :
Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel



RENSTRA DINAS KESEHATAN

Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Dinas Kesehatan Kota Bogor

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah

Misi 1 dan 2 yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran di tingkat kota selanjutnya diterjemahkan lagi ke dalam tujuan dan sasaran masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan memiliki 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran guna mendukung pencapaian Misi 1 dan 2 Kota Bogor.

Penjabaran program Dinas Kesehatan yang mendukung tercapainya kinerja dari tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Program Dinas Kesehatan Kota Bogor

MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
	Terwujudnya pola hidup sehat di masyarakat	Meningkatnya Rumah tangga sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019–2024 selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan kemudian selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja tahun 2022.

Berikut sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Bogor tahun 2022 :

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,4 Point	150.647.266.168
2.	Meningkatnya Rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	70%	9.659.464.700
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	80,01	86.716.272.871

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 3 (tiga) indikator diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang akan menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Pada tahun 2022, ketercapaian kinerja mencapai 95,9% dari keseluruhan indikator. Adapun rincian realisasi per indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran Dinas Kesehatan

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022
Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,4 Point	0,26 Point	0,4 Point
Meningkatnya Rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	70%	69,3%	70,2%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	80,01	A	77,05

Sasaran 1

Terwujudnya Keluarga Sehat

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Terwujudnya Keluarga Sehat adalah Indeks Keluarga Sehat. Terdapat 12 (Dua Belas) Indikator yang dapat menggambarkan pencapaian indeks keluarga sehat diantaranya yaitu :



1

Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)



2

Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan



3

Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap



4

Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif



5

Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan



6

Penderita Tuberculosis Paru mendapatkan pengobatan secara teratur



7

Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur



8

Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan



9

Anggota keluarga tidak ada yang merokok



10

Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

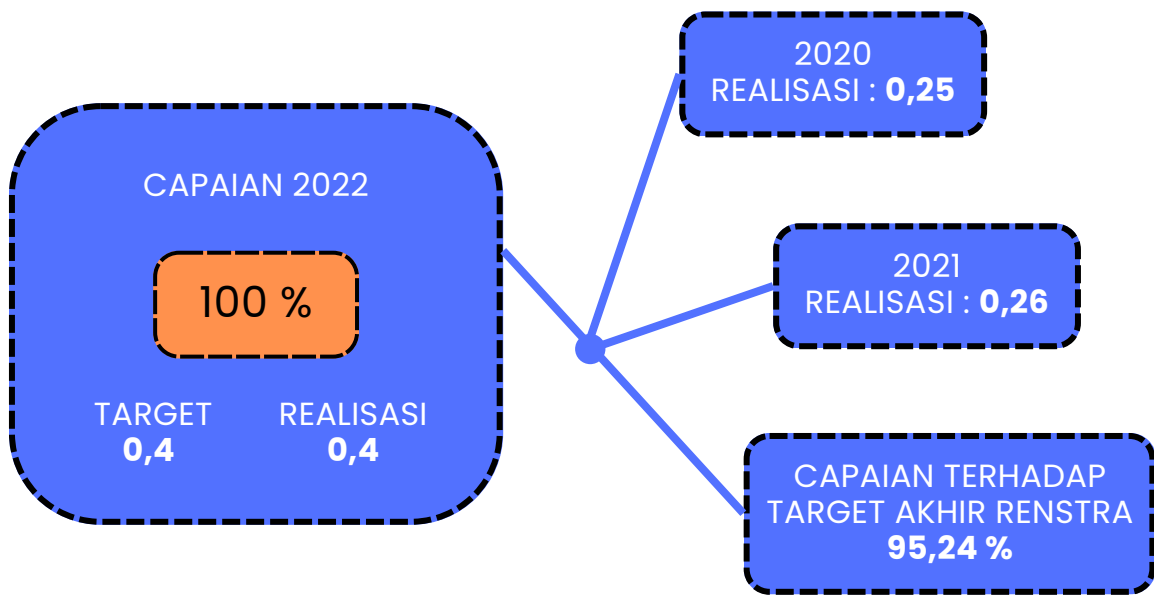


11

Keluarga mempunyai akses sarana air bersih



Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat



BAGAN 3.1 CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KELUARGA SEHAT

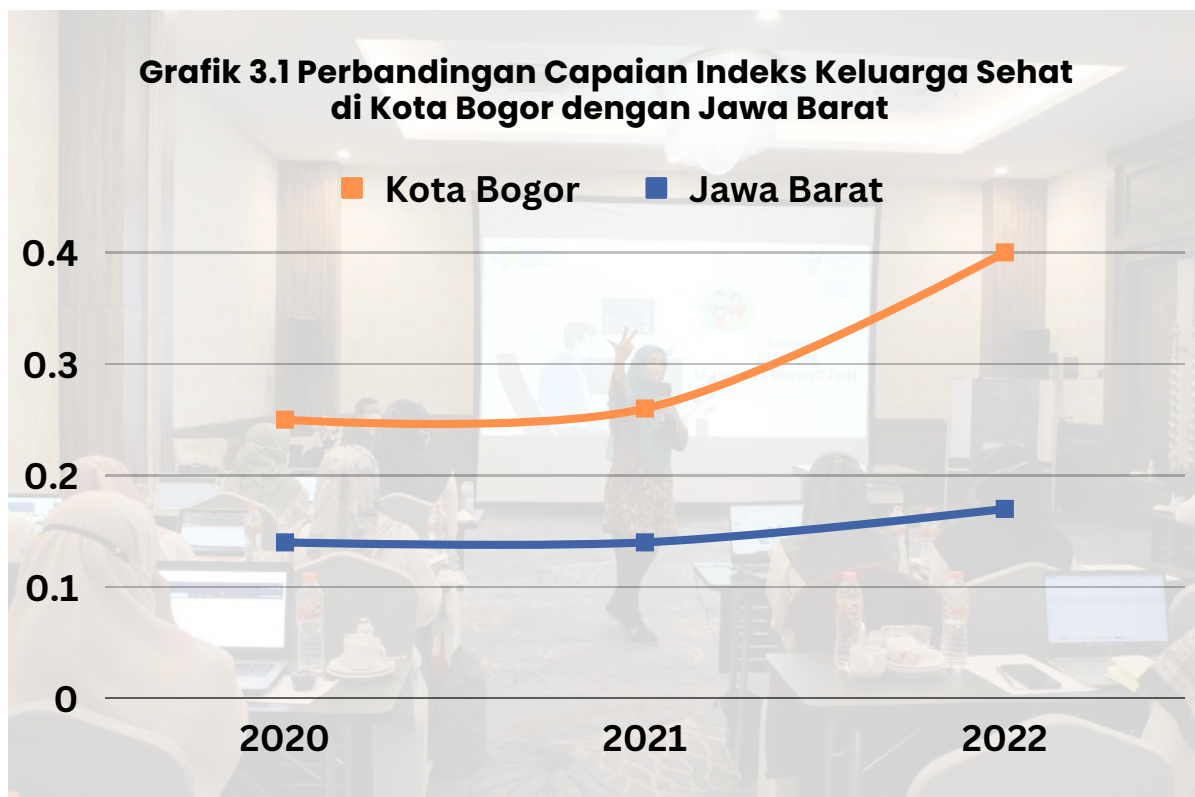
Indeks Keluarga Sehat merupakan gambaran dari Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Tujuan dari pelaksanaan PIS-PK yaitu untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi :

- pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar;

- mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan;
- mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan
- diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Bagan 3.1 dapat dilihat bahwa capaian indeks keluarga sehat (IKS) di tahun 2022 sebesar 100% (tercapai) dan bila dibandingkan dengan target akhir rencana strategis perubahan Dinas Kesehatan Kota Bogor capaian indeks keluarga sehat sebesar 95,24%.

Jika dibandingkan dengan capaian indeks keluarga sehat di Jawa Barat, capaian indeks keluarga sehat di Kota Bogor berada diatas capaian Jawa Barat dan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 terdapat kenaikan capaian indeks keluarga sehat di Kota Bogor maupun Jawa Barat. Hal ini dapat terlihat dari Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kota Bogor dengan Jawa Barat di bawah :



- Berdasarkan grafik diatas, capaian Kota Bogor tahun 2020 (0,25 point) lebih tinggi sebesar 0,11 point dari capaian Jawa Barat (0,14 point).
- Begitu pun pada Tahun 2021, capaian Kota Bogor (0,26 point) lebih tinggi sebesar 0,12 point dari capaian Jawa Barat (0,14 point).
- Serta di Tahun 2022, capaian Kota Bogor (0,40 point) lebih tinggi sebesar 0,23 point dari capaian Jawa Barat (0,17 point).

Adapun program yang mendukung pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kota Bogor meliputi 3 (tiga) program diantaranya yaitu :

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.

Efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 10,03% atau setara dengan Rp. 16.044.962.214.

Upaya yang telah dilakukan

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor maupun Puskesmas untuk dapat meningkatkan capaian intervensi dan IKS Puskesmas.

● Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan

Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan PIS-PK

1



Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor

2



Refreshing terkait konsep PIS-PK, Penggunaan Aplikasi dan Analisis hasil PIS-PK

3



Pembinaan Teknis PIS-PK

4



● Upaya yang telah dilakukan oleh Puskesmas

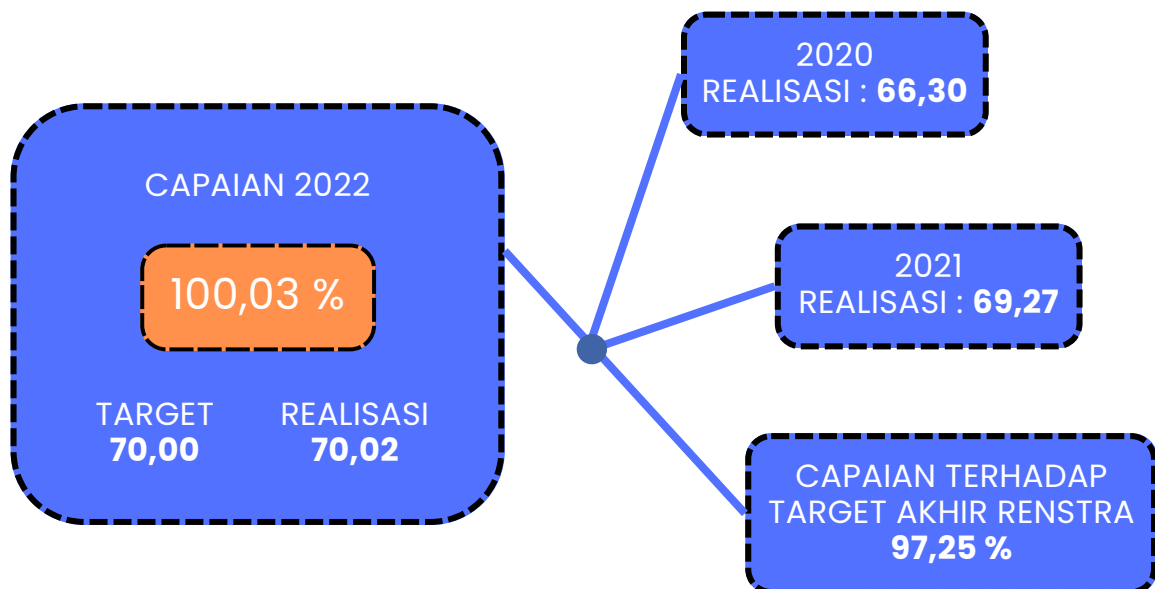
1. Update data dalam Aplikasi KS
2. Intervensi lanjut yang terintegrasi dengan program terkait
Ada beberapa tingkatan intervensi yang dapat dilakukan oleh Puskesmas yaitu :
 - Intervensi tingkat individual, sasarannya adalah individu. Contoh intervensi yang diberikan berupa anjuran untuk segera berobat secara rutin ke faskes jika dalam kunjungan keluarga ada salah satu anggotanya terdeteksi menderita hipertensi, dll
 - Intervensi tingkat keluarga, sasarannya adalah keluarga. Contoh intervensi yang diberikan berupa anjuran pengadaan sarana air bersih, jamban sehat, anjuran tidak merokok bagi kepala keluarga, karena efeknya untuk semua keluarga, dll
 - Intervensi tingkat masyarakat yang disebut sebagai UKM (upaya kesehatan masyarakat) atau *public health intervention*. Bentuknya beragam, bisa berupa menumbuh-kembangkan UKBM, penerapan kawasan tanpa rokok, pemicuan STBM, pemicuan P2TMBM, Upaya Kesehatan Masjid, dll.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektor terkait.

Sasaran 2 Meningkatnya rumah tangga sehat



Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya rumah tangga sehat, diukur melalui indikator Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS. Adapun Data PHBS rumah tangga (RT) diperoleh dari hasil survei pendataan PHBS RT yang dilakukan oleh petugas promosi kesehatan puskesmas dan kader di masing-masing RW.

Hasil survei tersebut kemudian dilanjutkan dengan penginputan sekaligus pengolahan data oleh petugas promkes puskesmas. Persentase Rumah tangga ber-PHBS ditentukan dari capaian 10 indikator PHBS rumah tangga. Apabila terdapat 1 dari 10 indikator yang tidak tercapai, maka akan dikategorikan sebagai rumah tangga yang tidak ber-PHBS.



BAGAN 3.2 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE RUMAH TANGGA BER-PHBS

Berdasarkan Bagan 3.2 diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator Persentase Rumah tangga ber-PHBS Tahun 2022 sebesar 100,03% dan bila dibandingkan dengan target akhir perubahan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Bogor capainnya sebesar 97,25%.

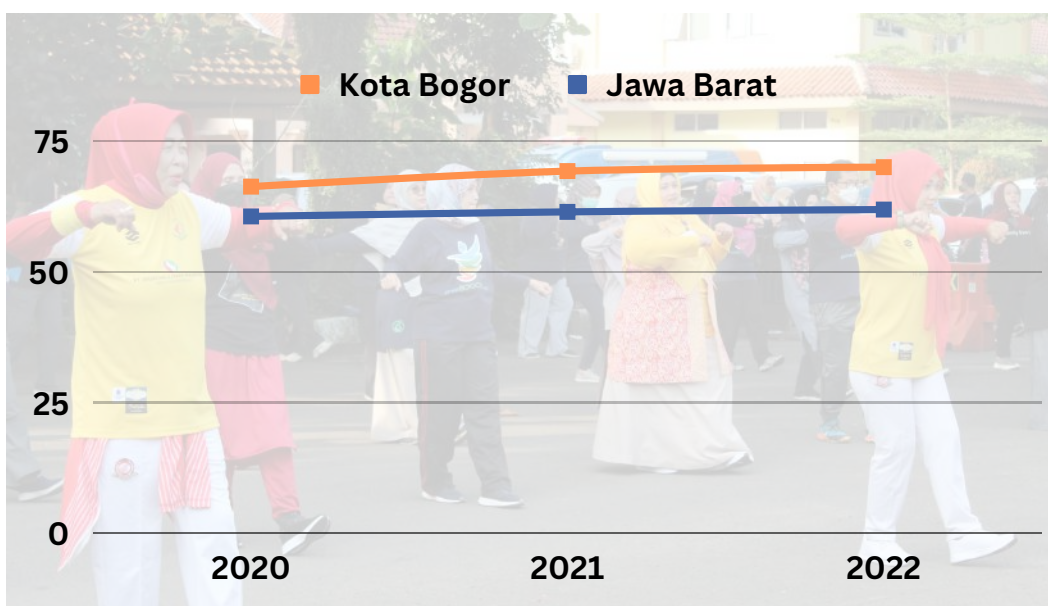
Tabel 3.2 Capaian Indikator Persentase Rumah tangga ber-PHBS

Indikator	Realisasi		Target	Realisasi	Capaian
	2020	2021	2022		
Persentase Rumah tangga ber-PHBS	66,3	69,3	70	70,02	100,03%

Apabila dibandingkan dari tahun ke tahun capaian persentase rumah tangga ber-PHBS menunjukkan adanya peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 diatas.

- Tahun 2022 realisasi persentase rumah tangga ber-PHBS sebesar 70.02% sudah mencapai target indikator yaitu 70.0%;
- Untuk realisasi persentase rumah tangga ber PHBS tahun 2021 (69.3%) terjadi kenaikan sebesar 3.0% dari realisasi tahun 2020 (66.3%);
- Serta terdapat kenaikan realisasi persentase rumah tangga ber PHBS dari realisasi tahun 2021 (69.3%) ke tahun 2022 (70.0%) sebesar 0.7%.

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Kota Bogor dengan Jawa Barat



Sumber : Profil Kesehatan Jawa Barat 2020 dan 2021.

Begitupun halnya bila dibandingkan dengan capaian jawa barat, capaian Dinas Kesehatan Kota Bogor berada di atas capaian Jawa Barat.

- Capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Jawa Barat Tahun 2020 sebesar 60,6 %. Apabila dibandingkan, capaian Kota Bogor lebih tinggi sebesar 5,7%.
- Tahun 2021 capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Jawa Barat sebesar 61,47 %. Apabila dibandingkan, capaian Kota Bogor lebih tinggi sebesar 7,8%.
- Selain itu, Tahun 2022 capaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS Jawa Barat sebesar 61,91 %. Apabila dibandingkan, capaian Kota Bogor lebih tinggi sebesar 8,11%.

Adapun perbandingan realisasi persentase 10 indikator PHBS rumah tangga tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Indikator PHBS Rumah Tangga Tahun 2019 s/d 2022

No	10 Indikator PHBS Rumah Tangga	2019	2020	2021	2022
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan	95.0	94.4	93.8	97.7
2	Memberi Bayi ASI Eksklusif (0-6 bulan)	72.4	68.4	70.4	72.1
3	Menimbang Bayi dan Balita (0-59 bulan) setiap bulan	90.5	83.7	85.7	87.1
4	Menggunakan air bersih	98.2	95.5	98.3	99.2
5	Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun	96.7	96.3	97.7	98.9
6	Menggunakan jamban sehat	86.2	83.4	85.1	84.7
7	Memberantas jentik nyamuk	96.3	94.8	96.1	97.5
8	Makan sayur dan buah setiap hari	91.9	92.5	95.5	97.0
9	Melakukan aktifitas fisik setiap hari minimal 30 menit	94.4	93.5	94.3	95.7
10	Tidak merokok di dalam rumah	65.8	67.5	70.1	71.3

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, terdapat tiga indikator dengan capaian terendah yaitu Indikator "Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan"; Indikator "Menggunakan Jamban Sehat" ; Indikator "Tidak merokok di dalam rumah".

Adapun penyebab dari rendahnya capaian ketiga indikator tersebut adalah :

1. Kurangnya dukungan dari suami dan keluarga akan pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada bayi;
2. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang ASI Eksklusif;
3. Ibu yang bekerja sulit untuk memenuhi kebutuhan ASI bagi bayi sehingga bayi diberi susu formula;
4. Sebagian masyarakat masih berorientasi pada bantuan dalam pembangunan jamban;
5. Sempitnya lahan untuk pembuatan sarana pembuangan;
6. Jamban sehat masih belum menjadi prioritas kebutuhan;
7. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok di dalam rumah khususnya bahaya asap rokok bagi perokok pasif;
8. Perilaku atau kebiasaan merokok yang sulit diubah dan membutuhkan waktu yang lama;
9. Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi orang yang merokok di dalam rumah.

Pencapaian Persentase Rumah tangga ber-PHBS di Kota Bogor didukung oleh capaian program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis diatas sebesar 1,46% atau setara dengan Rp. 141.030.050.

Upaya yang telah dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan guna mencapai target Persentase Rumah tangga ber-PHBS, diantaranya :

- Pelaksanaan program inovasi ngariung sehat di wilayah yang memiliki cakupan PHBS RT yang rendah;
- Pembentukan Komunitas Warga Tanpa Rokok (KWTR) khususnya di wilayah dengan realisasi indikator tidak merokok di dalam rumah yang rendah;
- Peningkatan sosialisasi melalui penyuluhan maupun media promosi kesehatan baik media cetak, media sosial, media elektronik terkait Jamban sehat, ASI Eksklusif, dan tidak merokok di dalam rumah;
- Penyuluhan ASI Eksklusif tidak hanya kepada ibu hamil dan ibu menyusui tetapi juga kepada suami dan keluarga agar mendukung pemberian ASI Eksklusif kepada bayi usia 0-6 bulan;
- Pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kesehatan terutama dalam mendukung indikator tidak merokok di dalam rumah;
- Adanya kebijakan di masing-masing wilayah seperti Surat Edaran Lurah kepada masyarakat untuk mengakses jamban sehat;
- Kegiatan pemecuan STBM yang dilaksanakan dengan melibatkan kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna, Babinsa dan Babinkamtibmas dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak buang air besar sembarangan dan mendorong masyarakat untuk berusaha memiliki dan menggunakan sarana jamban yang memenuhi syarat kesehatan;
- Adanya bantuan pembangunan sarana jamban dan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) komunal yang bersumber dana dari pemerintah maupun non pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan cakupan pemakaian jamban yang memenuhi syarat kesehatan.



Kegiatan Monev Program Ngariung Sehat

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan adalah Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kesehatan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.4/Kep.254-Bag.Org/2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45.300 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Berdasarkan Permenpan 25 Tahun 2020, tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

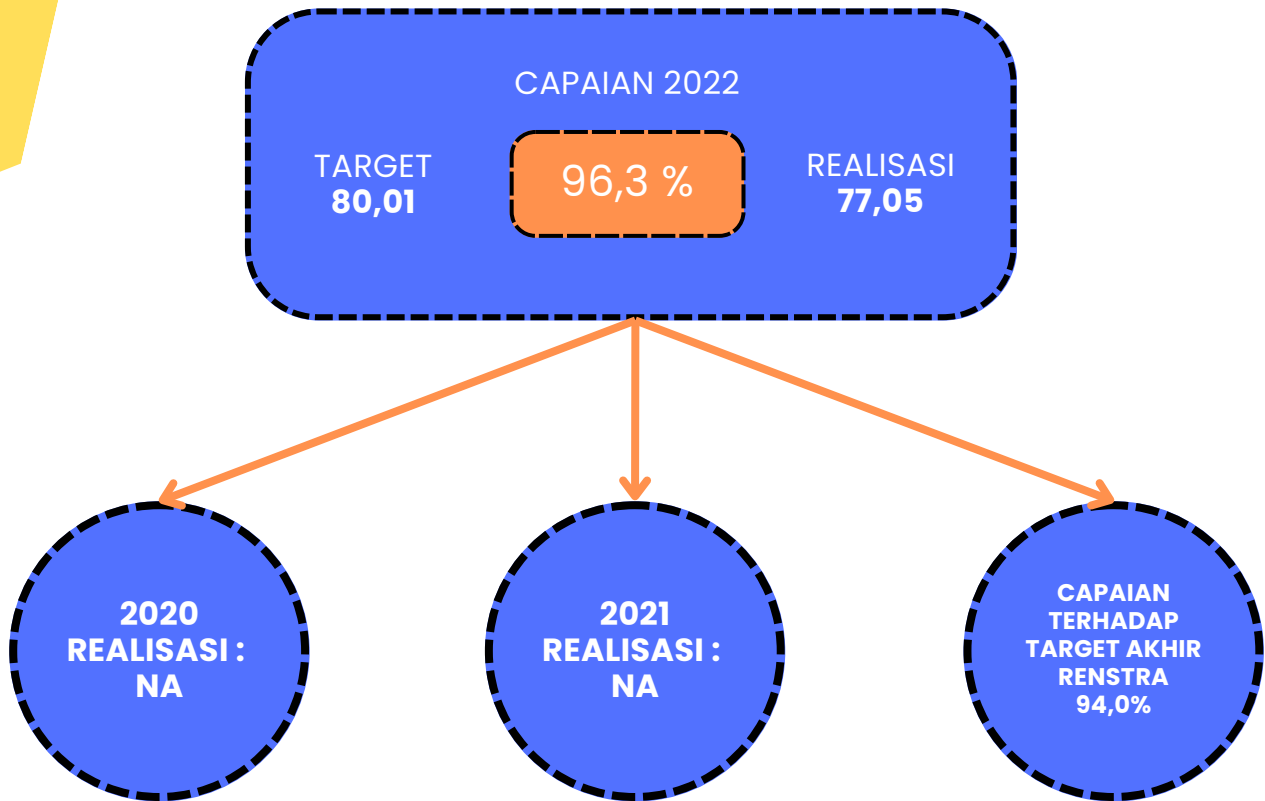
- Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- Birokrasi yang Kapabel;
- Pelayanan Publik yang Prima.

Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus kepada delapan area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Publikasi Standar, Maklumat, Alur Pelayanan
Dinas Kesehatan Kota Bogor

BAGAN 3.2 CAPAIAN INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH



Pada Tahun 2020 dan 2021 belum dilakukan penilaian indeks reformasi birokrasi di tingkat OPD. Sedangkan di Tahun 2022 mulai dilakukan kembali penilaian indeks reformasi birokrasi di semua OPD se-Kota Bogor dengan Tim Penilai dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor.

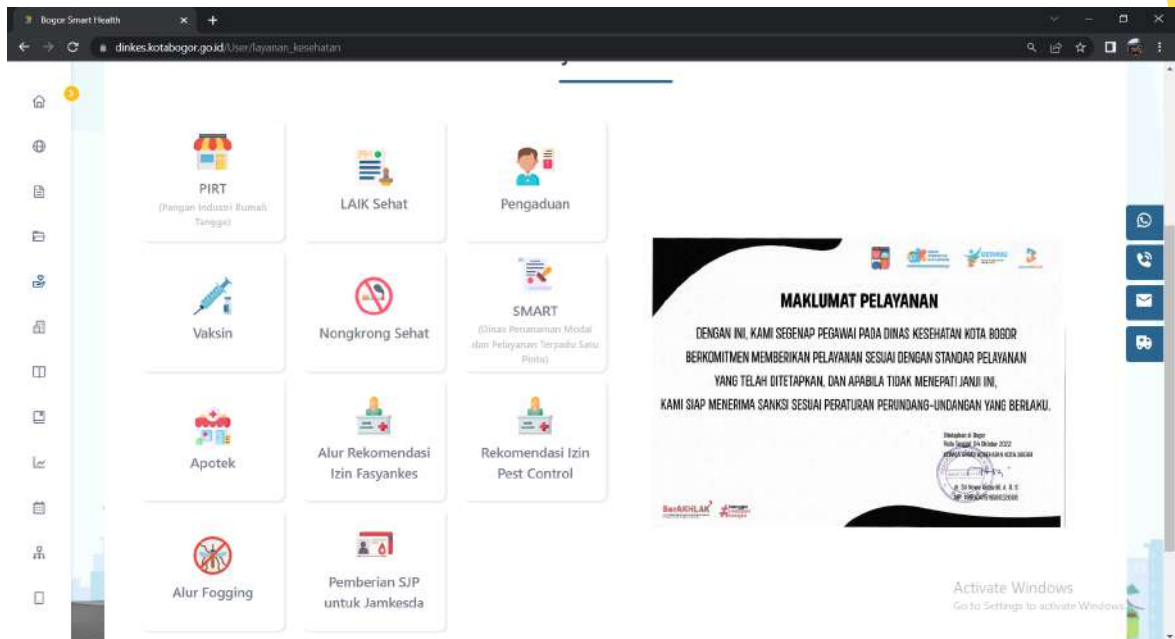
Berdasarkan hasil tim penilai Reformasi Birokrasi OPD Kota Bogor Tahun 2022, seluruh perangkat daerah mengalami penurunan nilai indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini terjadi juga pada Dinas Kesehatan Kota Bogor, Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Kesehatan sebesar 77,05 dengan capaian sebesar 96,3%. Akan tetapi, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kota Bogor mengalami kenaikan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Capaian Indikator AKIP Dinas Kesehatan Kota Bogor

Indikator	Realisasi		Target	Realisasi	Capaian
	2020	2021	2022		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	BB	A	A	100%

Upaya yang telah dilakukan

- Dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat telah menggunakan teknologi informasi seperti <https://oss.go.id/> serta segala informasi alur layanan dapat diakses melalui : https://dinkes.kotabogor.go.id/User/layanan_kesehatan



- Selama Tahun 2022 Dinas Kesehatan telah mendapatkan beberapa apresiasi diantaranya :

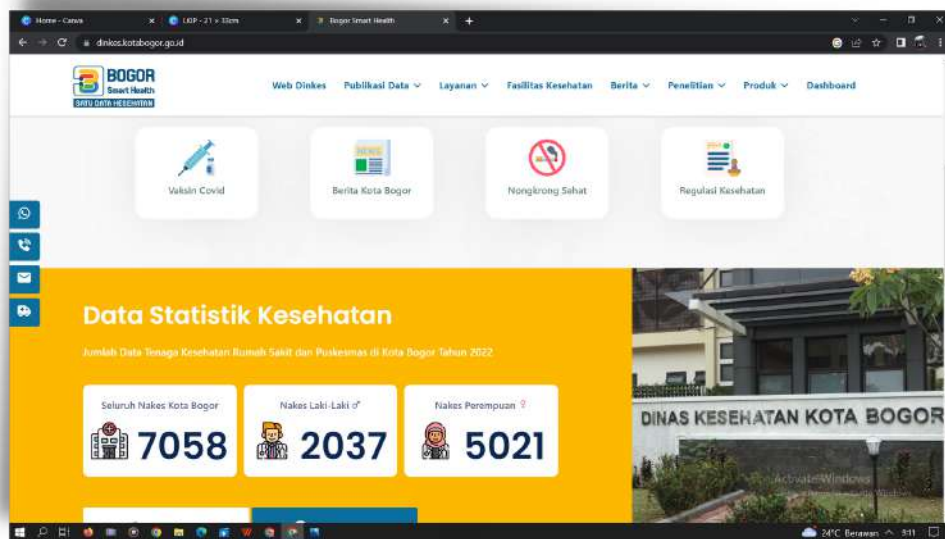


Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Terbaik III pada pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kategori Daerah Kabupaten/Kota dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Kota dengan Pelaporan Implementasi Germas Terbaik dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2022



- Dinas Kesehatan Tahun 2022 memiliki satu agen perubahan yang mana telah membuat inovasi dan telah terintegrasi dalam sistem manajemen. Agen Perubahan pada Dinas Kesehatan telah membuat Aksi Perubahan yang bernama **Bogor Smart Health**. Bogor Smart Health - Satu Data Kesehatan merupakan integrasi data untuk peningkatan pelayanan kesehatan cerdas dalam mendukung terwujudnya Kota Bogor Smart Health City.

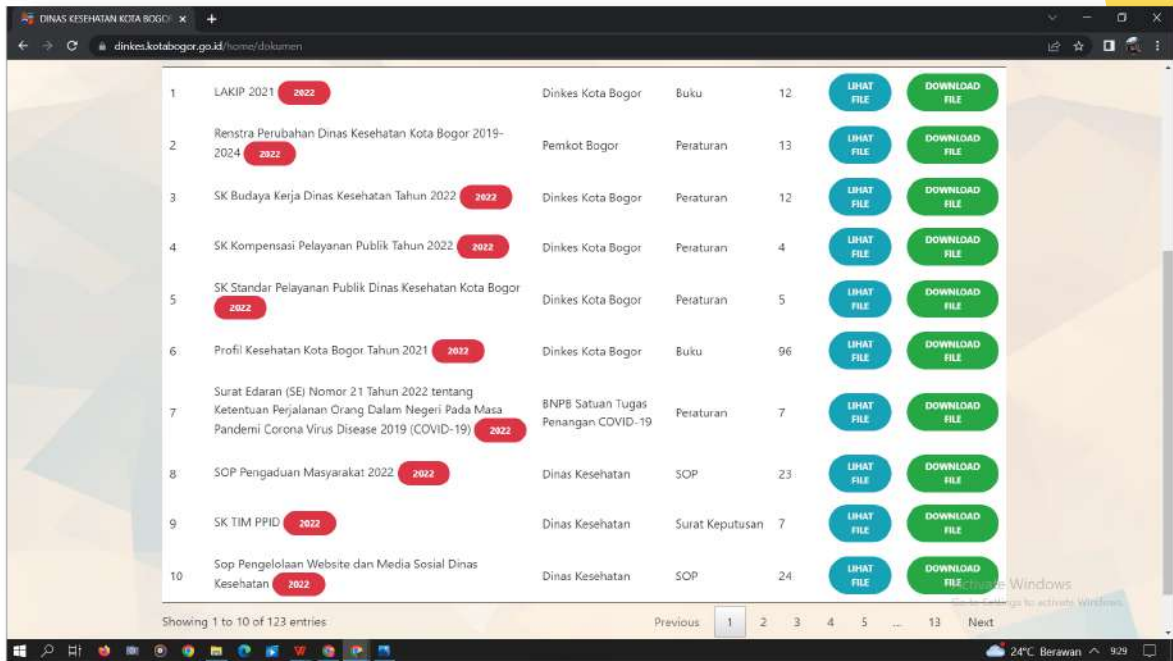


sumber : <https://dinkes.kotabogor.go.id/>

- Dalam rangka mewujudkan transparansi informasi, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melaksanakan penyebaran informasi melalui berbagai media sosial diantaranya Instagram dan Website Dinkes.



Penyebarluasan Informasi melalui Instagram terkait tarif pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018. Tarif retribusi tersebut berlaku terhadap tiga pelayanan publik yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Masyarakat.



Penyebarluasan informasi terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2021, SK Budaya Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022, SK Kompensasi Pelayanan Publik Tahun 2022.

Tahun 2022 Dinas Kesehatan memperoleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 84,1 dengan kriteria mutu pelayanan BAIK. Informasi tersebut telah dipublikasikan di media sosial dan telah dipublikasikan pada Lobby Gedung B Dinas Kesehatan.



Begitupun hal nya dengan Maklumat Pelayanan Dinas Kesehatan, telah dilakukan publikasi baik melalui media sosial maupun media komunikasi massa tulis (Mading).

Rekomendasi dari Tim Penilai

Berdasarkan hasil Tim Penilai Reformasi Birokrasi, Dinas Kesehatan Kota Bogor telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut :

- Pola pelaksanaan *change management* khususnya pengelolaan reformasi birokrasi dan Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
- Pemetaan atas kebijakan yang menghambat kinerja organisasi telah dilakukan, namun perlu terus dilakukan updating secara berkala agar kebijakan yang dikeluarkan tetap selaras dan dapat mengakselerasi kinerja perangkat daerah;
- Kebijakan terkait keterbukaan informasi publik telah ditetapkan, namun monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan secara berkala;
- Kinerja individu pada setiap pegawai telah ditetapkan, namun belum dilaksanakan pengukuran kinerja individu secara periodik dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian *reward and punishment* lainnya;
- Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum diimplementasikan pada seluruh pegawai;
- Belum dilaksanakan pembangunan serta monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas;
- Standar pelayanan telah ditetapkan dan dimaklumkan, namun belum dilakukan revidi dan perbaikan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat);
- Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan (SKM) baru dilaksanakan 2 kali dalam setahun.

TARGET DAN KINERJA PROGRAM

Pengukuran tingkat capaian kinerja Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Program Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022		%
			Realisasi	Target	Realisasi		
Sasaran 1 : Terwujudnya Keluarga Sehat							
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1 Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	74,5	96,7	65	73,26	87,29%
		1.2 Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3,15	3,47	3	3,72	76,02%
		1.3 Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,36	3,58	3,2	3,89	78,49%
		1.4 Persentase Balita berstatus gizi normal	85,1	83,3	86,3	85,86	99,49%
		1.5 Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90	72	90	71,32	79,24%
		1.6 Prevalensi Hipertensi	6,4	6,62	7,2	7,46	103,61%
		1.7 Case Fatality Rate Covid-19	2,4	1,2	1,2	0,11	190,84%
		1.8 Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,11	0,11	0,12	0,16%	131,40%
		1.9 Akses sanitasi terhadap air bersih	99	99%	99,4	98,93%	99,53%
		1.10 Akses jamban sehat	79	76,34	82	82,36%	100,40%
		1.11 Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	91,1	90,46	93	96,11	103,35%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.1 Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	87	89,7	90	92,00%	102,20%
		2.2 Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	90	0	88	100,00%	113,60%
		2.3 Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	NA	97,4	81	83,12%	102,60%

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022		%	
			Realisasi		Target	Realisasi		
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	3.1	Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	N/A	50%	85%	100%	117,60%
		3.2	Persentase Penggunaan Obat Rasional	75	80%	79%	79%	100%
		3.3	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	N/A	64%	92%	92,81%	101%
Sasaran 2 : Meningkatkan Rumah tangga sehat								
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.1	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	4	7,35	8	10,29	128,6%
		4.2	Predikat Kota Sehat	Tahun 2020 tidak ada penilaian	Tahun 2021 tidak ada penilaian	Swastisaba Wiwerda	Tidak dapat mengikuti penilaian Kota Sehat	0
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan								
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	A	BB	A	A	100%
		5.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,34	3,23	3.40	3,36	98,82%

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dapat disimpulkan pada tahun 2022 terdapat 8 (delapan) indikator program yang tidak mencapai target dan 13 indikator program yang mencapai target.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENGENGAH

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Bogor sebagaimana tabel berikut :

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	%
Sasaran 1 : Terwujudnya Keluarga Sehat					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	55	73,26	66,8%
	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	2,8	3,72	67,1%
	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3	3,89	70,3%
	Persentase Balita berstatus gizi normal	%	87	85,86	98,7%
	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	%	90	71,32	79,2%
	Prevalensi Hipertensi	%	8,4	7,46	88,8%
	Case Fatality Rate Covid-19	%	0,10	0,11	110,0%
	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	0,14	0,16	114,3%
	Akses sanitasi terhadap air bersih	%	100	98,93	98,9%
	Akses jamban sehat	%	86	82,36	95,8%
	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	96	96,11	99,8%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	100	92,00
Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi		%	100	100	100,0%
Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan		%	95	83,12	87,5%

PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2022	%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls I tertentu yg memenuhi standar kesehatan	%	90	100	111,1%
	Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	83	79	95,2%
	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	%	96	92,81	96,7%
Sasaran 2 : Meningkatnya Rumah tangga sehat					
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	11,00	10,29	93,5%
	Predikat Kota Sehat	Predikat	Swastisaba Wiwerda	Tidak dapat mengikuti penilaian Kota Sehat sebab tidak memenuhi persyaratan terkait jumlah keluarga ODF	0,0%
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan	Point	A	A	100,0%
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,5	3,36	96,0%

FAKTOR KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Prevalensi Hipertensi

1. Dinas Kesehatan Kota Bogor memiliki program inovasi Pamong Walagri. Pamong Walagri adalah deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang dikhususkan untuk PNS sehingga meningkatkan cakupan deteksi dini karena sasaran deteksi dini (usia produktif) banyak terdapat di tempat kerja. Peningkatan cakupan deteksi berbanding lurus dengan meningkatnya angka penemuan kasus, sehingga target penemuan kasus hipertensi tercapai.
2. Tercapainya target penemuan kasus juga tidak terlepas dari adanya integrasi dan kolaborasi dengan lintas program dimana tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Bogor mencetuskan Paguyuban Salapan (9 sasaran dalam 9 tatanan).

Case Fatality Rate Covid-19

1. Pelaksanaan kegiatan *tracing* kasus Covid-19 dan tatalaksana kontak erat.
2. Koordinasi dengan Rumah Sakit terkait ketersediaan tempat isolasi dan tatalaksana.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan surveilans Covid-19 di daerah.
4. Adanya kajian atau laporan mingguan data Covid-19 mencakup kegiatan *testing, tracing dan treatment* disertai capaian vaksinasi sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan oleh Pimpinan di Kota Bogor.

Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

1. Dinkes Kota Bogor bekerjasama dengan RSMM pada kegiatan ACT (*Assertive Community Treatment*) dimana RSMM, puskesmas, dan lintas sektor lainnya bersama-sama melakukan pendampingan kepada pasien ODGJ yang sudah melewati masa rawat dari RS agar siap diterima dan menjalani kehidupan di masyarakat. Sehingga ada rujuk balik dari RSMM ke puskesmas pada pasien ODGJ (temuan kasus ODGJ di wilayah).
2. Dinkes kota Bogor bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan UI dalam pembentukan Kelurahan Desa Siaga Jiwa, sehingga mahasiswa dan puskesmas melakukan kegiatan keswa di wilayah dan melakukan kegiatan deteksi dan penemuan kasus ODGJ (penemuan kasus terbantu oleh mahasiswa yang turun ke wilayah, meskipun SDM di Puskesmas terbatas).

3. Melaksanakan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dan kegiatan peningkatan wawasan tentang kesehatan jiwa bagi kader dan masyarakat.
4. Adanya Koordinasi dan informasi dari lintas program dan lintas sektor dalam penemuan kasus baru di wilayah.

Akses jamban sehat

1. Melakukan pendataan STBM sejak tahun 2021.
2. Melakukan pemutakhiran data STBM dari Tahun 2022 sampai dengan sekarang.
3. Melakukan kunjungan ke Kab/Kota lain dalam rangka *study banding* Percepatan ODF.
4. Membentuk TIM Percepatan ODF.
5. Melakukan pembentukan Tim Pembina Wilayah dari OPD Se-Kota Bogor dalam upaya Percepatan ODF.
6. Membuat form RASAJAGA dilengkapi dengan rencana intervensi terkait Jamban Sehat.
7. Adanya dukungan dari Kepala Daerah terkait Percepatan ODF.
8. Adanya pembangunan sarana fisik akses sanitasi dari Pemerintah, dan masyarakat secara mandiri, serta bantuan dari CSR.

Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

1. Adanya integrasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dalam optimalisasi program JKN.
2. Adanya peralihan kepesertaan PBI APBD (PD Pemda) ke PBI APBN yang signifikan oleh Dinas Sosial sehingga menambah ketersediaan kuota PBI APBD (PD Pemda), adanya integrasi peserta menunggak dan tidak mampu ke PBI APBD (PD Pemda) dan Integrasi kepesertaan bayi baru lahir dengan ibu peserta JKN aktif yang lahir sejak 2018 ke PBI APBD (PD Pemda).

Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)

1. Adanya monitoring ke Puskesmas dan Rumah sakit.

Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi

1. Adanya peningkatan kompetensi SDM di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor.
2. Terselenggaranya kegiatan uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang sudah memenuhi syarat.

Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan

1. Melakukan perhitungan perencanaan kebutuhan (renbut) dengan mengikutsertakan seluruh lintas program.
2. Pemenuhan tenaga kesehatan melalui berbagai sumber anggaran dengan proses rekrutmen sesuai ketentuan.

Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan

1. Pemberian Surat Rekomendasi Perizinan PKRT bagi PKRT yang mengajukan izin.

Persentase Penggunaan Obat Rasional

1. Tersediannya anggaran untuk kegiatan pengadaan obat baik bersumber dari APBD Kota Bogor maupun Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kefarmasian Tahun 2022.
2. Laporan Penggunaan Obat Rasional Puskesmas di Kota Bogor rutin diperiksa setiap bulan.
3. Melaksanakan bimbingan teknis tentang Penggunaan obat Rasional.
4. Mengevaluasi laporan Penggunaan Obat Rasional (POR) Puskesmas.

Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan

1. Pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan rutin dilakukan setiap 4 bulan sekali.
2. Pelaksanaan pembinaan secara berkala ke sarana produksi.
3. Menjalinkan komunikasi yang efektif dengan para pelaku usaha dengan membuat WhatsApp grup.

Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri

1. Adanya pembinaan dan pendampingan ke Kelurahan Siaga Aktif dan RW Siaga Aktif baik oleh Puskesmas maupun Dinkes
2. Adanya kegiatan FGD Kelurahan Siaga Aktif untuk membahas permasalahan di wilayah khususnya kesehatan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan

1. Dokumen perencanaan kinerja telah SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja lain yang terkait (crosscutting).
2. Pemanfaatan perencanaan kinerja telah menyajikan target dalam rencana aksi secara periodik, dan terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru.

PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET KINERJA

Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

1. Target rasio kematian Kota Bogor terlalu tinggi. Pada Tahun 2022 Kelahiran hidup di Kota Bogor hanya sebesar 17.745 KH sementara untuk perhitungan rasio kematian ibu pembaginya adalah 100.000 KH. Hal ini mengakibatkan hasil perhitungan rasio kematian ibunya menjadi tinggi. Idealnya AKI baru bisa dihitung setelah kelahiran hidup mencapai kumulatif 100.000.

Upaya yang telah dilakukan :

Melakukan upaya peningkatan kompetensi petugas dalam tata laksana kegawatdaruratan maternal dan tindakan pra rujukan serta melakukan upaya deteksi dini faktor resiko dan pemantauan pada bumil dengan faktor resiko. Selain upaya tersebut dilakukan juga upaya edukasi dan konseling terhadap keluarga dan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran dan perubahan perilaku terkait pentingnya menjaga ibu hamil dan merencanakan persalinan sehat dan aman

Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup

1. Penyebab utama meninggalnya bayi dikarenakan BBLR sehingga mengakibatkan berbagai komplikasi saat proses melahirkan.

Upaya yang telah dilakukan :

Edukasi dan konseling gizi pada ibu hamil, pemantauan pada ibu hamil KEK dan pemberian makanan tambahan serta peningkatan kompetensi terkait tatalaksana kegawatdaruratan neonatal/bayi.

Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup

1. Rasio kematian balita adalah nilai kumulatif dari kematian neonatal, bayi, dan balita. Kasus kematian balita usia 1-5 tahun sebanyak 3 kasus. Sedangkan untuk penyebab kematiannya dikarenakan BBLR.

Upaya yang telah dilakukan :

Edukasi dan konseling gizi pada ibu hamil, pemantauan pada ibu hamil KEK dan pemberian makanan tambahan serta peningkatan kompetensi terkait tatalaksana kegawatdaruratan neonatal/bayi.

Persentase Balita berstatus gizi normal

- Adanya pengelompokan status gizi balita yang lebih detail dari sebelumnya, misalnya saat kriteria awal masih dikategorikan sebagai status gizi normal menjadi status resiko gizi berlebih.

Upaya yang telah dilakukan :

Memfokuskan program gizi tidak hanya pada yang malnutrisi tapi pada yang overnutrisi

Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus

1. Pasien TBC di rumah sakit banyak yang mengalami *loss to follow up* karena Pasien sering pindah pengobatan tanpa adanya konfirmasi.
2. Hasil evaluasi akhir pengobatan pasien, banyak yang belum dievaluasi terutama di rumah sakit dikarenakan pencatatan manual yang belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Melacak pasien dengan langsung menghubungi pasien atau melakukan koordinasi dengan Puskesmas di wilayah domisilinya untuk memastikan penyebab pasien tidak melanjutkan pengobatannya,
2. Penguatan pada programmer TB di Fasyankes,
3. Edukasi mengenai urgensi keberlanjutan pengobatan TB.

Akses sanitasi terhadap air bersih

1. Berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) masih ditemukan sarana air yang tidak memenuhi syarat Kesehatan yaitu sarana yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi terutama untuk sarana air jaringan non perpipaan.
2. Khusus sarana air jaringan perpipaan (PDAM), tidak semua masyarakat dapat mengakses sarana tersebut, karena kondisi sosio-ekonomi masyarakat, dan sudah memiliki sumber air lain (non PDAM), serta belum terjangkaunya aliran air PDAM ke masyarakat.
3. Pada uji petik pemeriksaan kualitas air, masih ditemukannya bakteri coliform / e.coli dalam air.

Upaya yang telah dilakukan :

Edukasi pada masyarakat melalui pemicuan STBM pilar ke-3 terkait pengamanan air minum dan makanan rumah tangga, serta dilakukannya pembinaan dan pengawasan/ surveilans kualitas air minum baik sarana jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Selain itu juga, dilakukan koordinasi dan advokasi dengan SKPD pengampu.

Predikat Kota Sehat

1. Tidak terpenuhinya persyaratan minimal jumlah kelurahan ODF yaitu 80% kelurahan harus sudah mencapai ODF di Kota Bogor, sedangkan pada tahun 2022 Kota Bogor baru memiliki 2 kelurahan yang sudah ODF dari 68 Kelurahan yang ada di Kota Bogor

Upaya yang telah dilakukan :

Upaya kegiatan Kesehatan lingkungan melalui percepatan ODF yaitu dengan ditetapkannya SK Walikota tentang Penetapan Kelurahan Lokus Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan atau ODF di 68 kelurahan, SK Walikota tentang Satuan Tugas Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan Tingkat Kota Bogor melalui rereongan akses sanitasi jamban keluarga (RASAJAGA), pemecuan 5 pilar STBM di 68 kelurahan, validasi data rumah BABS, rapat koordinasi lintas sector dalam rangka penguatan kelembagaan tingkat kota, tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, penyusunan dan pengiriman proposal pada CSR (corporate social responsibility) untuk percepatan ODF, serta pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi baik bersumber anggaran APBD, APBN dan CSR.

ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = \left[\frac{\% \text{ Capaian Kinerja}}{\% \text{ Capaian Penggunaan Anggaran atau biaya}} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.236.759.762.099, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp.256.274.623.739. Berdasarkan rumus efisiensi biaya diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 107,0%. Berdasarkan besaran penggunaan anggaran, maka dapat diasumsikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya biaya pada Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Selain itu, Dinas Kesehatan telah mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam meningkatkan pencapaian kinerja. Efisiensi dan efektifitas pegawai telah dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan, meliputi adanya tugas rangkap pekerjaan dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi jabatan masing-masing pegawai, serta adanya kolaborasi dan integrasi antar bidang dalam pencapaian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Penilaian kinerja capaian keuangan diukur berdasarkan pengukuran kinerja keuangan terhadap belanja yang mendukung pelaksanaan pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor.

Berikut Pengukuran Kinerja Keuangan yang dihitung dengan membandingkan Pagu Anggaran dengan Realisasi yang mendukung setiap sasaran kinerja :

Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM	PAGU	REALIASI	%
Terwujudnya Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp148.234.803.580,00	Rp133.342.636.080,00	89,95%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp11.133.463.888,00	Rp10.042.458.574,00	90,20%
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp530.618.700,00	Rp468.829.300,00	88,36%
Meningkatnya Rumah tangga sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp9.659.464.700,00	Rp9.518.434.650,00	98,54%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp86.716.272.871,00	Rp83.387.403.495,00	96,16%
TOTAL		Rp256.274.623.739,00	Rp236.759.762.099,00	92,39%

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa total pagu anggaran yang menunjang 5 (lima) program di Dinas Kesehatan Kota Bogor sebesar Rp. 256.274.623.739,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 236.759.762.099,00 (92,39%).

Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, capaian serapan anggaran tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun 2021. Capaian serapan anggaran tahun 2021 sebesar 85,30% sedangkan tahun 2022 sebesar 92,39%.

Tabel 3.7 Perbandingan Penggunaan Anggaran Tahun 2021-2022

PROGRAM	2021		%	2022		%
	PAGU	REALIASI		PAGU	REALIASI	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	166,679,130,421	130,262,160,443	78,15	148.234.803.580	133.342.636.080	96,16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	21,158,388,076	19,419,616,615	91,78	11.133.463.888	10.042.458.574	90,20
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	606,888,000	501,206,500	82,59	530.618.700	468.829.300	88,36
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	14,931,976,000	14,718,841,550	98,57	9.659.464.700	9.518.434.650	98,54
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,863,332,223	81,816,223,459	95,29	86.716.272.871	83.387.403.495	96,16
	289.239.714.720	246.718.048.567	85,30	256.274.623.739	236.759.762.099	92,39

Pagu Anggaran tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2022 dikarenakan tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Bogor mendapatkan dana tambahan bersumber anggaran DBH-CHT untuk penanggulangan Covid-19.

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kota Bogor. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022, dari 3 (tiga) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target (66,7%) dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target (33,3%). Apabila capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian sebagai berikut :

Skala Capaian (%)	Kategori
85-100	Sangat Baik
70-<85	Baik
55-<70	Cukup
<55	Kurang

dapat diambil kesimpulan bahwa capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Bogor termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Begitu juga halnya dengan realisasi kinerja anggaran Dinas Kesehatan yang telah melampaui capaian pada tahun 2021 (85,30%), dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 92,39%.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- Mempertahankan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan PIS-PK di Puskesmas disertai dengan penguatan manajemen puskesmas yang terintegrasi dengan PIS-PK dan pelaksanaan *feedback* laporan capaian IKS Puskesmas.
- Memfollow up kembali terkait penggunaan QRIS Dinamis sebagai salah satu metode pembayaran dalam pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bogor kepada BJB dan Bapenda Kota Bogor.

- Strategi pencapaian Indikator PHBS meliputi Pelaksanaan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) oleh tim penegak dan pembina KTR, Pelaksanaan Sidak KTR di 6 Kecamatan pada Tingkat kota dan di 68 kelurahan pada tingkat puskesmas, pengadaan penanda kawasan tanpa rokok di 9 kawasan, Pertemuan Penguatan Tim Pembina KTR dan OPD Lainnya, Kampanye *Smoke Free Directory* pada Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Pelaksanaan Pertemuan Penguatan Peran Kader dalam Pembinaan PHBS Rumah Tangga, Rapat koordinasi PHBS rumah Tangga tingkat Kota Bogor, Pertemuan penguatan jejaring kemitraan potensial dalam program PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya, Kampanye PHBS, Germas, dan program kesehatan lainnya tingkat Kota Bogor, Pengadaan Stiker PHBS Rumah Tangga.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 ini disusun agar menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pencapaian yang ada dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM Kota Bogor Tahun 2019-2024 sehingga dapat dijadikan bahan acuan dalam perbaikan dimasa yang akan datang.

LKIP

—

2

0

2

2

—

KOTA BOGOR, JAWA BARAT

**DIN
KES**



**PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KESEHATAN**

JL. R.M. Tirta Adhi Soerjo No. 3 Tanah Sareal Kota Bogor 16132

Telp/Fax. (0251) 8331753

Website : www.dinkes.kotabogor.go.id, e-mail : dinkes@kotabogor.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

NOMOR : 800 / 3350 / DINKES / TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bogor ;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bogor.

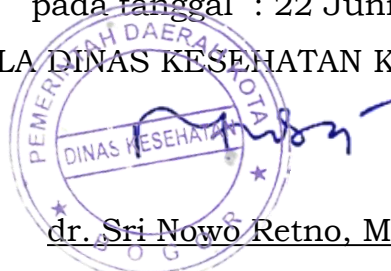
KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

pada tanggal : 22 Juni 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR



dr. Sri Nowo Retno, MARS

NIP:19690415 199803 2008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

NOMOR : 800 / 3350 / DINKES / 2022

TANGGAL : 22 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama/Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Bogor
2. Tugas : Melaksanakan sebagian urusan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Penanggung Jawab	Sumber Data
		Uraian Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Perhitungan	Satuan		
1	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat dengan indeks >80 dibagi jumlah seluruh keluarga dikali 100%	Point	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan
2	Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata dikali 100%	%	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Hasil PMPRB Dinas Kesehatan Kota Bogor	Nilai	Sekretaris Dinas Kesehatan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan Kota Bogor

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2022-2024
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,4 Point	0,41 Point	0,42 Point
2	Meningkatnya rumah tangga sehat	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS	70 %	71 %	72 %
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Lingkup Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	80,01 Nilai	81 Nilai	82 Nilai

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

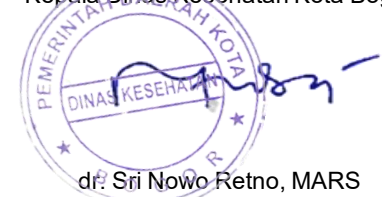


dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP:19690415 199803 2008

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN IKU DINAS KESEHATAN TRIWULAN I TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	Target		Triwulan I				Penanggung Jawab	Keterangan
				2022	Triwulan I	Pembilang	Penyebut	Nilai Absolut	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata dikali 100%	70	0	0	0	0	0	Promkes	Data diukur pada akhir tahun
2	Indeks Keluarga Sehat	Point	Jumlah Keluarga Sehat dengan indeks >80 dibagi jumlah seluruh keluarga dikali 100%	0,4	0,3	58374	195851	0,3	100%	Yankesprim	
3	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Hasil PMPRB Dinas Kesehatan Kota Bogor	80,01	0	0	0	0	0	Renlap	Belum dilakukan penilaian

Bogor, 05 April 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor



dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP. 19690415 199803 2 008

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN IKU DINAS KESEHATAN TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	Target		Triwulan II				Penanggung Jawab	Keterangan
				2022	Triwulan II	Pembilang	Penyebut	Nilai Absolut	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata dikali 100%	70	0	0	0	0	0	Promkes	Data diukur pada akhir tahun
2	Indeks Keluarga Sehat	Point	Jumlah Keluarga Sehat dengan indeks >80 dibagi jumlah seluruh keluarga dikali 100%	0,4	0,32	64023	197013	0,32	100%	Yankesprim	
3	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Hasil PMPRB Dinas Kesehatan Kota Bogor	80,01	0	0	0	0	0	Renlap	Belum dilakukan penilaian

Bogor, 05 Juli 2022
 Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor



dr. Sri Nowo Retno, MARS
 NIP. 19690415 199803 2 008

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN IKU DINAS KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	Target		Triwulan III				Penanggung Jawab	Keterangan
				2022	Triwulan III	Pembilang	Penyebut	Nilai Absolut	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata dikali 100%	70	0	0	0	0	0	Promkes	Data diukur pada akhir tahun
2	Indeks Keluarga Sehat	Point	Jumlah Keluarga Sehat dengan indeks >80 dibagi jumlah seluruh keluarga dikali 100%	0,4	0,35	68452	197396	0,35	100%	Yankesprim	
3	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Hasil PMPRB Dinas Kesehatan Kota Bogor	80,01	0	0	0	0	0	Renlap	Belum dilakukan penilaian

Bogor, 05 Oktober 2022
 Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor

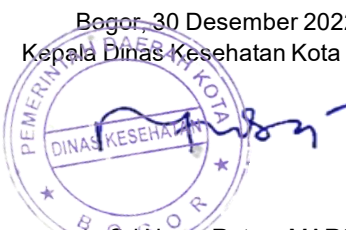


dr. Sri Nowo Retno, MARS
 NIP. 19690415 199803 2 008

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN IKU DINAS KESEHATAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Cara Perhitungan	Target		Triwulan IV				Penanggung Jawab	Keterangan
				2022	Triwulan IV	Pembilang	Penyebut	Nilai Absolut	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata dikali 100%	70	70	146529	209261	70%	100%	Promkes	
2	Indeks Keluarga Sehat	Point	Jumlah Keluarga Sehat dengan indeks >80 dibagi jumlah seluruh keluarga dikali 100%	0,4	0,4	79883	197896	0,4	100%	Yankesprim	
3	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	Hasil PMPRB Dinas Kesehatan Kota Bogor	80,01	80,01	77,05	100	77,05	96,30%	Renlap	

Bogor, 30 Desember 2022
 Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor



dr. Sri Nowo Retno, MARS
 NIP. 19690415 199803 2 008

EVALUASI REALISASI PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2022

INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI					PENANGGUNG JAWAB
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KUMULATIF	
Indeks Keluarga Sehat	0,4	0,30	0,32	0,35	0,40	0,40	Kepala Dinas
Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	70,00	-	-	-	70,02	70,02	
Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	80,01 Nilai	-	-	-	77,05	77,05	
Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3.40 Point	-	-	3,36	-	3,36	Sekretaris Dinas
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Point	-	-	A	-	A	
Persentase temuan BPK dan inspektorat yang ditindak lanjuti	100%	-	-	-	100%	100%	Kepala Sub Bagian Keuangan
Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	94,93%	101,32%	98,56%	99,88%	97,37%	
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90%	-	-	100,00%	-	100,00%	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	-	-	100,00%	-	100,00%	
Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	-	-	100,00%	100,00%	
Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	-	-	-	100,00%	100,00%	
Nilai LAKIP Dinas Kesehatan	A	-	-	A	-	A	Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Berbasis Smart Health	75%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	76,00%	
Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan	1 Dokumen	-	-	1	-	1	
Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan	1 Dokumen	-	-	-	1	1	

INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI					PENANGGUNG JAWAB
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KUMULATIF	
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dokumen	1	-	-	-	1	
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	1 Dokumen	-	-	-	1	1	
Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	90%	14,88%	16,92%	15,90%	19,84%	71,32%	Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Prevalensi Hipertensi	7,2	2,31%	0,81%	2,31%	2,03%	7,46%	
Case Fatality Rate Covid-19	1,2	0,07	0,49	0,17	0,21	0,11	
Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	0,12%	0,086%	0,002%	0,024%	0,05%	0,16%	
Akses sanitasi terhadap air bersih	99,40%	98,93%	98,93%	98,93%	98,93%	98,93%	
Akses jamban sehat	82%	76,70%	76,70%	76,70%	82,36%	82,36%	
Prevalensi Diabetes Militus	2%	0,70%	0,25%	0,67%	0,42%	2,05%	
Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	92%	97,50%	93,10%	89,09%	-	92,81%	
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	19,60%	23,67%	31,87%	32,35%	110,65%	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	16,31%	17,58%	22,68%	52,50%	109,07%	
Prevalensi Covid-19	≤ 3,5 %	2,05%	0,08%	0,46%	0,27%	2,85%	
Persentase imunisasi Covid-19	70%	92,60%	93,65%	93,91%	93,96%	93,96%	
Jumlah kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan (SBS) atau ODF	1	1	1	1	2	2	Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga
Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene	61%	73,77%	6,56%	9,84%	8,20%	98,36%	

INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI					PENANGGUNG JAWAB
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KUMULATIF	
Persentase PMJ dan Sentra yang diterbitkan stiker pembinaan	54%	16,67%	6,67%	0,00%	40,00%	63,33%	
Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	7,08%	16,69%	35,10%	45,38%	104,26%	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveilans
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	32,06%	11,30%	32,08%	28,19%	103,63%	
Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	35,12%	12,59%	33,68%	22,30%	103,69%	
Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	65	73,67	95,67	80,97	43,94	73,26	
Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3,0	2,95	3,59	3,64	4,61	3,72	
Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,2	3,19	3,59	3,64	5,05	3,89	
Persentase Balita berstatus gizi normal	86,3	87,16%	-	85,86%	-	85,86%	
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	8 %	-	-	-	10,29%	10,29%	
Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wiwerda	-	-	-	Tidak dapat mengikuti penilaian Kota Sehat sebab tidak memenuhi persyaratan terkait jumlah keluarga ODF	Tidak dapat mengikuti penilaian Kota Sehat	
Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil sesuai standar	100%	90,44%	95,78%	105,30%	98,96%	97,36%	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga

INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI					PENANGGUNG JAWAB
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KUMULATIF	
Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	100%	88,78%	90,20%	106,64%	98,94%	95,88%	
Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	100%	92,74%	95,12%	111,12%	102,41%	99,69%	
Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	87,90%	86,37%	102,71%	101,02%	94,42%	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	-	-	-	100,00%	100,00%	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	25,00%	25,01%	27,25%	22,75%	100,00%	
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)	10,1	3,74%	-	3,25%	-	3,25%	Sub Koordinator Pembinaan dan Pelayanan Gizi
Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	4,09%	4,67%	-	4,82%	-	4,82%	
Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	1,75%	2,42%	-	2,43%	-	2,43%	
Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30%	-	-	-	15,38%	15,38%	Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS \geq target PHBS tingkat kota	55%	-	-	-	69,12%	69,12%	
Persentase UKBM yang memiliki strata purnama dan mandiri	5,80%	-	-	-	41,87%	41,87%	
Persentase UKBM lain berstrata Madya	3,50%	-	-	-	8,90%	8,90%	
Persentase kawasan yang mematuhi Perda KTR	39,50%	-	-	-	71,60%	71,60%	

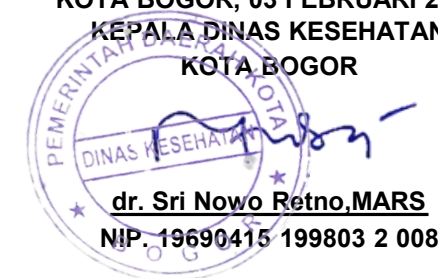
INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI					PENANGGUNG JAWAB
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KUMULATIF	
Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	90	83,55%	83,73%	84,12%	87,04%	92,00%	Kepala Dinas Sumber Daya Kesehatan
Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	88	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	
Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	81	83,12%	83,12%	83,12%	83,12%	83,12%	
Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	85%	-	-	-	100	100	
Persentase Penggunaan Obat Rasional	79%	-	-	-	79,00%	79,00%	
Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang bersertifikat	92 %	97,50%	93,10%	89,09%	-	92,81%	Sub Koordinator Perbekalan Kesehatan Pengawasan Obat Makanan
Jumlah Usaha Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10 Sarana	-	10	-	-	10	
Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah	70%	-	-	-	73,1708	73,1708	Sub Koordinator Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0,7	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	
Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Covid-19	1 fasilitas	-	1	1	1	1	
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)	90%	83,55%	83,73%	84,12%	92,00%	92,00%	Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen	81 %	83,12%	83,12%	83,12%	83,12%	83,12%	
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,88	1,53	1,54	1,53	1,55	1,53	

INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI					PENANGGUNG JAWAB
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KUMULATIF	
Jumlah tenaga yang mendapat pengembangan kompetensi	262 orang	-	2	59	299	299	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	150 Dokumen	875	1759	1634	355	355	
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	93%	91,02%	92,33%	93,49%	96,11%	96,11%	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Kunjungan Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bogor Anjang Sehat (BAS) *(Program Unggulan Walikota)	3500	1560	2752	3820	3929	3929	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	90%	-	-	-	92%	92%	
Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	0,19%	0,27%	0,27%	0,28%	0,28%	0,28%	Sub Koordinator Pembinaan Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	84 %	82%	82%	83%	84%	84%	
Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	100%	97,96%	-	-	6,12%	104,08%	
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	49 Unit	48	-	-	3	51	
Jumlah RS yang terakreditasi	19 Unit	-	-	-	19	19	
Jumlah Klinik yang terakreditasi	4 Unit	-	-	-	4	4	
Jumlah Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi	26 Unit	-	-	-	26	26	
Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	100%	81,8%	-	-	13,6%	95,5%	
Jumlah Instrumen Pembinaan Klinik	1 Dokumen	-	-	-	1	1	

INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI					PENANGGUNG JAWAB
		TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	KUMULATIF	
Jumlah Instrumen Pembinaan Klinik dengan pemeriksaan PCR maupun antigen	1 Dokumen	-	-	-	1	1	
Laporan hasil pemantauan dan verifikasi pelayanan hemodialisis di RS	7 Laporan	-	-	-	7	7	
Laporan Jumlah Laboratorium yang melaporkan INM	12 Unit	-	-	-	-	-	
Jumlah Rekomendasi Penilaian Kesesuaian Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D	4 Laporan	-	-	-	4	4	
Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	96%	106,67%	106,67%	106,67%	117,87%	109,47%	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan
Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	93%	91,02%	92,33%	93,49%	96,11%	96,11%	

KOTA BOGOR, 03 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BOGOR



dr. Sri Nowo Retno, MARS
NIP. 19690415 199803 2 008